

BAB V

KESIMPULAN

Amerika Serikat sebagai negeri adidaya dan sangat berpengaruh di dunia internasional dalam kebijakan luar negerinya banyak melakukan berbagai intervensi bahkan invasi di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut pernah terjadi dalam dasawarsa terakhir ini dengan dilumpuhkannya kelompok Taliban yang dipandang sebagai teroris pasca tragedi 11 September serta dilengserkannya Saddam Husein sebagai pemimpin Irak yang dianggap dictator. Pada masa revolusi *Arab Spring* yang berimbas pada lengsernya pemimpin-pemimpin dictator seperti Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, Moammar Qaddafi di Libya dan sebagainya, Amerika Serikat juga mengambil peran penting bagi terjadinya proses “demokratisasi” yang melanda beberapa kawasan tersebut termasuk yang terjadi pula di Suriah di bawah pimpinan Basyar Asad.

Di Suriah, Negara kaya minyak yang saat ini dipimpin oleh Presiden Basyar Asad tersebut kini mengalami masa-masa krisis yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan oleh rakyatnya sendiri yang menginginkan Asad untuk turun dari jabatannya karena dianggap otoriter dan banyak melakukan tindak kejahatan kemanusiaan. Dalam krisis Suriah tersebut, atas nama moralitas dan dalam upaya menjunjung tinggi Hak-hak asasi kemanusiaan, Amerika Serikat memberikan dukungannya kepada oposisi dan menganggap pemerintahan Basyar Asad telah banyak melakukan kejahatan kemanusiaan dan bertindak otoriter dan represif. Dukungan Amerika Serikat tertuang melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi mengenai kecaman dunia internasional atas kejahatan di Suriah

resolusi DK PBB tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari seluruh anggotanya. Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB bahkan memveto resolusi tersebut dan menganggap bahwa resolusi yang ditawarkan oleh PBB hanyalah kedok atau dalih yang digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam upaya mencapai kepentingannya di Suriah.

Kepentingan Amerika Serikat melalui intervensinya di Suriah merupakan sebuah keniscayaan jika dilihat dari *track record* negeri Paman Sam tersebut. Hal ini tercantum dalam berbagai kebijakan luar negerinya semenjak Presiden terdahulunya, Woodrow Wilson hingga Barrack Obama. Amerika Serikat, dalam beberapa kebijakan luar negerinya terutama di kawasan Timur Tengah, terkesan seperti koin dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai Negara penjunjung tinggi demokrasi, sementara di sisi lain Amerika Serikat mempunyai orientasi kebutuhan sumber daya alam, minyak dan gas. Di satu sisi politik luar negeri Amerika Serikat dapat berperan untuk melindungi negara lain dengan cara memperluas kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, disisi lain AS mempunyai tugas mengubah system internasional dengan tatanan dunia baru melalui proses demokratisasi.

Kepentingan Amerika Serikat melalui dukungannya terhadap oposisi di Suriah mengandung beberapa kepentingan yang hendak dicapai, antara lain: kepentingan politik berupa menguatnya posisi Israel di kawasan Timur Tengah; kepentingan ideologi dalam rangka menyebarkan sistem demokrasi sebagai upaya